

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bakhri, S. (2020). *Dokumentasi dan Pemilu: Proses Pemilihan dalam Demokratis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utsman, S. (2013). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wiyanto, R. (2014). *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: Mandar Maju.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E
ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

C. Jurnal Ilmiah

Muhtar Dahri, Salman Sayuti, dan Febrian Chandra (2023), *Penerapan Kitab
Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu, Wajah Hukum*, Vol. 7
No. 2.

Surohmat. (2021). "Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum." *Jurnal Al-Qisth Law Review*, vol. 5, no. 1.

D. Website

Bawaslu RI. (2023). *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.

"Bawaslu Resmi Laporkan Mahyarudin dan Rexsi ke Mapolres Tebo, Begini Penjelasan Polisi." (2025, 4 Februari). *jambione.com*. Tersedia di: <https://www.jambione.com/daerah/1364655970/bawaslu-resmi-laporkan-mahyarudin-dan-rexsi-ke-mapolres-tebo-begini-penjelasan-polisi?page=2>